

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BOGOR

Roby Syafii Lubis¹Atik Rochaeni²Lukman Munawar Fauzi³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

Abstract

The issue of stunting has become a national priority in Indonesia, as it directly affects human resource quality and future development. This study evaluates the policy of the Bogor Regency Government in accelerating stunting reduction programs using Dunn's (2003) framework, which consists of five dimensions: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. A qualitative descriptive approach was applied, with data collected through in-depth interviews with local government officials, health workers, and community representatives, as well as observations and document reviews. The findings reveal that the stunting reduction policy has been effective in increasing public awareness and improving access to nutrition programs. However, its adequacy in fully addressing the determinants of stunting, such as sanitation and poverty, remains limited. Equity challenges were identified, as some remote areas still experience unequal access to health services. Responsiveness was relatively good, with communities actively involved in integrated service posts (posyandu) and health campaigns, though feedback mechanisms remain weak. Appropriateness analysis indicates that the policy aligns with national priorities but requires stronger inter-sectoral coordination. The study concludes that while the policy has contributed positively to reducing stunting prevalence, sustainable progress requires integrated interventions, adequate resource allocation, and equitable service distribution.

Keywords: policy evaluation; stunting reduction; public health; Bogor Regency; Dunn's framework

PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting secara nasional mencapai 21,6%, angka yang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu di bawah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

20%. Kondisi ini berimplikasi serius pada kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengingat stunting berdampak langsung terhadap perkembangan fisik, kecerdasan, produktivitas, bahkan daya saing bangsa di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah pusat menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024.

Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat menghadapi tantangan berat dalam penanganan stunting. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2022, angka stunting masih berada di kisaran 24%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingginya prevalensi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan gizi seimbang, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, serta permasalahan sanitasi dan air bersih di sejumlah wilayah pedesaan.

Sebagai respon, Pemerintah Kabupaten Bogor merumuskan kebijakan percepatan penurunan stunting dengan mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting) 2021–2024. Kebijakan ini melibatkan intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta intervensi sensitif yang lebih luas, seperti penyediaan sanitasi, akses air bersih, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan edukasi gizi. Dengan pendekatan multi-sektor, pemerintah daerah berharap dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting secara signifikan.

Namun, meskipun kebijakan sudah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai sektor, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya kendala dalam implementasi. Beberapa wilayah pedesaan masih sulit dijangkau, fasilitas kesehatan terbatas, dan koordinasi antarinstansi sering kali belum optimal. Masyarakat pun masih menghadapi hambatan dalam mengakses informasi gizi yang tepat, sehingga partisipasi belum merata. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor benar-benar berjalan sesuai harapan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Evaluasi kebijakan menjadi penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran tentang capaian program, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Tanpa evaluasi yang menyeluruh, kebijakan penurunan stunting berisiko tidak tepat sasaran, tidak efisien, dan gagal mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi juga penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan daerah selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada satu rumusan masalah utama, yaitu: “Bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah daerah tentang program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor?”. Pertanyaan ini menjadi kunci untuk memahami kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara komprehensif kebijakan percepatan penurunan stunting yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bogor. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Dunn (2003) yang menilai kebijakan dari lima dimensi utama diantaranya, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Urgensi penelitian ini tidak hanya pada aspek akademik, yakni memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur evaluasi kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat, tetapi juga pada aspek praktis, yakni memberikan masukan konkret bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat strategi dan pelaksanaan program penurunan stunting. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.

Kerangka Teori

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Dunn (2003:429), evaluasi kebijakan tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

menganalisis relevansi, keberlanjutan, dan keadilan dari implementasi kebijakan. Evaluasi sangat penting dalam konteks kebijakan kesehatan masyarakat, termasuk stunting, karena masalah ini bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan komprehensif lintas sektor.

Dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan Dunn, kebijakan penurunan stunting dapat dianalisis melalui lima dimensi:

1) Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks stunting, efektivitas dapat diukur melalui capaian penurunan prevalensi, peningkatan cakupan intervensi spesifik dan sensitif, serta perubahan perilaku gizi masyarakat.

2) Kecukupan

Kecukupan menilai apakah hasil yang dicapai sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, apakah intervensi yang dilakukan sudah mampu mengatasi penyebab mendasar stunting, seperti gizi buruk, sanitasi buruk, dan kemiskinan.

3) Pemerataan (Equity)

Pemerataan menekankan pada distribusi manfaat kebijakan. Dalam konteks ini, evaluasi akan melihat apakah semua kelompok masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan terpencil, mendapat akses yang setara terhadap layanan gizi dan kesehatan.

4) Responsivitas

Responsivitas melihat sejauh mana kebijakan menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam program, sejauh mana layanan sesuai harapan, serta mekanisme pengaduan atau umpan balik yang tersedia.

5) Ketepatan (Appropriateness)

Ketepatan mengacu pada kesesuaian kebijakan dengan nilai dan tujuan jangka panjang pembangunan. Dalam kasus stunting, kebijakan dikatakan tepat bila selaras

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

dengan visi pembangunan sumber daya manusia dan sejalan dengan prioritas nasional.

Kerangka teori ini dipilih karena mampu memberikan analisis menyeluruh, mulai dari capaian teknis hingga relevansi sosial kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi tidak hanya keberhasilan program penurunan stunting di Kabupaten Bogor, tetapi juga area yang masih perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, petugas posyandu, kader PKK, dan masyarakat penerima manfaat program. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pelayanan gizi dan sanitasi. Data sekunder berasal dari dokumen kebijakan daerah, laporan prevalensi stunting, serta publikasi resmi pemerintah. Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode.

PEMBAHASAN

Program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan pusat dan implementasi daerah. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa capaian kebijakan masih beragam, dengan beberapa aspek yang berhasil dan lainnya yang masih menghadapi kendala. Untuk memahami hal ini, evaluasi dilakukan dengan lima dimensi Dunn.

1) Dimensi Efektifitas

Secara teoretis, efektifitas kebijakan mengacu pada sejauh mana program atau kebijakan publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2003). Dalam konteks kebijakan percepatan penurunan stunting, efektifitas diukur dari tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka prevalensi stunting,

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

meningkatkan cakupan layanan gizi, serta memperbaiki perilaku masyarakat terkait pola asuh dan konsumsi makanan bergizi. Efektivitas tidak hanya dilihat dari keluaran (*output*) seperti jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari hasil nyata (*outcome*) yang dapat dirasakan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan berbagai program intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT), imunisasi lengkap, dan pemantauan tumbuh kembang balita di *posyandu*. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, program ini menjangkau lebih dari 80% balita di wilayah perkotaan dan sekitar 60–70% di wilayah perdesaan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan *posyandu* kini lebih aktif dan mendapat dukungan dari kader PKK serta perangkat desa. Namun demikian, prevalensi stunting di Kabupaten Bogor masih berada di kisaran 24%, lebih tinggi dari target nasional yang ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024.

Peneliti menemukan bahwa efektivitas kebijakan masih terkendala oleh faktor struktural dan sosial. Secara struktural, keterbatasan tenaga gizi di Puskesmas dan ketimpangan distribusi petugas menjadi hambatan utama. Dari sisi sosial, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya gizi ibu hamil dan perilaku cuci tangan pakai sabun. Keterbatasan literasi gizi ini berakibat pada rendahnya partisipasi aktif dalam program, terutama di wilayah terpencil.

2) Dimensi Kecukupan

Dimensi kecukupan dalam evaluasi kebijakan berkaitan dengan pertanyaan: “Apakah hasil kebijakan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah publik?” (Dunn, 2003). Dalam konteks penurunan stunting, kecukupan berarti sejauh mana intervensi yang dilakukan pemerintah daerah mampu menutupi seluruh penyebab stunting —baik yang bersifat langsung (gizi, kesehatan ibu dan anak) maupun tidak langsung (sanitasi, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya).

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Hasil wawancara dengan pejabat Bappeda menunjukkan bahwa kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Bogor sudah mencakup intervensi gizi dan non-gizi, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi. Program gizi berjalan di bawah Dinas Kesehatan, sementara intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih dan sanitasi masih menjadi tanggung jawab dinas lain. Data dari Dinas PUPR menunjukkan bahwa hanya 64% rumah tangga di wilayah pedesaan yang memiliki akses terhadap jamban sehat, sementara 22% masih mengandalkan sumber air tidak terlindungi.

Observasi peneliti di Kecamatan Cariu dan Leuwiliang menemukan bahwa masyarakat di daerah terpencil masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan dan sumber gizi yang memadai. Selain itu, keterlambatan distribusi PMT dan rendahnya koordinasi antarinstansi memperlemah kecukupan kebijakan. Salah seorang kader *posyandu* menyampaikan, “Program bagus, tapi tidak semua keluarga dapat bantuan, dan tidak setiap bulan datang petugas.”

Analisis peneliti menunjukkan bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor belum cukup memadai untuk mengatasi seluruh determinan stunting. Meskipun intervensi sudah mencakup banyak sektor, intensitas dan cakupannya belum proporsional dengan kompleksitas permasalahan. Kesimpulan sementara: kebijakan cukup baik dalam kerangka perencanaan, namun belum mencukupi secara operasional karena keterbatasan sumber daya dan ketidakterpaduan pelaksanaan di lapangan.

3) Dimensi Pemerataan

Pemerataan atau *equity* dalam evaluasi kebijakan menekankan keadilan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan. Dalam konteks kebijakan stunting, pemerataan berarti semua lapisan masyarakat —baik perkotaan maupun pedesaan, kaya maupun miskin— memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap layanan gizi, kesehatan, dan edukasi. Kebijakan dikatakan berhasil secara merata jika tidak ada kesenjangan geografis maupun sosial dalam pelaksanaan dan hasilnya.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Penelitian ini menemukan bahwa pemerataan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Bogor masih menjadi tantangan besar. Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa wilayah selatan dan timur Kabupaten Bogor memiliki tingkat partisipasi *posyandu* yang lebih rendah dibandingkan wilayah tengah dan utara. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sukamakmur menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan gizi hanya dilakukan dua bulan sekali karena keterbatasan tenaga kesehatan. Sebaliknya, di wilayah Cibinong, kegiatan tersebut dapat dilakukan setiap dua minggu.

Kesenjangan ini juga terlihat dari distribusi bantuan PMT dan program sanitasi yang belum menjangkau seluruh wilayah prioritas. Menurut laporan internal Bappeda (2023), dari 40 kecamatan, baru 27 kecamatan yang memperoleh dukungan penuh program intervensi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan masih lemah, terutama pada daerah dengan topografi sulit dijangkau.

Peneliti menilai bahwa kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Bogor cenderung bias terhadap wilayah dengan akses infrastruktur lebih baik. Ketimpangan ini berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan karena daerah dengan tingkat stunting tertinggi justru tidak mendapat perhatian maksimal. Sehingga kebijakan sudah berjalan merata secara administratif, tetapi belum berkeadilan secara substantif karena distribusi program masih belum setara antarwilayah.

4) Dimensi Responsifitas

Responsivitas dalam evaluasi kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan publik menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan kepuasan masyarakat (Dunn, 2003). Dalam kebijakan penurunan stunting, responsivitas mencakup partisipasi masyarakat dalam program, kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, dan keberadaan mekanisme pengaduan atau umpan balik.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader PKK dan petugas gizi, masyarakat mulai menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya gizi dan kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah juga telah melibatkan tokoh agama dan masyarakat lokal dalam kampanye “Bogor Bebas Stunting.” Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih pasif dalam kegiatan *posyandu* dan penyuluhan karena waktu kegiatan sering tidak menyesuaikan jadwal warga.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk *Tim Percepatan Penurunan Stunting* (TPPS) yang berfungsi mengoordinasikan berbagai pihak. Akan tetapi, mekanisme umpan balik dari masyarakat terhadap layanan program masih lemah. Tidak semua keluhan tentang keterlambatan distribusi bantuan gizi atau kesulitan akses layanan ditindaklanjuti secara cepat. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat responsivitas kebijakan cukup baik dalam aspek pelibatan masyarakat, tetapi masih kurang dalam aspek tindak lanjut aspirasi warga. Program sudah berhasil meningkatkan kesadaran publik, namun keberlanjutannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui layanan yang tanggap dan adaptif.

5) Dimensi Ketepatan

Ketepatan kebijakan (*appropriateness*) berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan dengan nilai, norma, dan tujuan jangka panjang pembangunan. Dalam konteks stunting, kebijakan dikatakan tepat apabila mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prioritas pembangunan manusia berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor secara normatif tepat. Kebijakan ini mengacu pada Stranas Stunting nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2021–2026 yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Namun, dari segi implementasi, masih terdapat ketidaktepatan teknis dalam koordinasi dan penentuan target sasaran.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Wawancara dengan pejabat Bappeda mengungkapkan bahwa data keluarga berisiko stunting belum sepenuhnya terintegrasi antarperangkat daerah, sehingga sering terjadi tumpang tindih sasaran bantuan. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara periodik di semua kecamatan. Observasi di lapangan juga memperlihatkan bahwa beberapa program berjalan secara sektoral, tanpa sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Berkaitan dengan ketepatan kebijakan secara strategis sudah baik, namun pelaksanaannya masih belum selaras secara operasional.

KESIMPULAN

Kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan lima dimensi Dunn (2003), kebijakan ini telah menunjukkan capaian positif, namun juga menyisakan sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi.

Dari dimensi efektivitas, kebijakan telah berhasil meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, memperluas kegiatan posyandu, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang. Namun, penurunan angka prevalensi stunting masih belum sesuai target yang diharapkan. Pada dimensi kecukupan, upaya yang dilakukan masih belum memadai untuk mengatasi seluruh determinan stunting, terutama yang berkaitan dengan sanitasi, kemiskinan, dan akses air bersih. Dimensi pemerataan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum merata di seluruh wilayah, karena wilayah pedesaan terpencil masih memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan intervensi gizi.

Sementara itu, dimensi responsivitas memperlihatkan peningkatan partisipasi masyarakat, namun mekanisme umpan balik dan respon terhadap keluhan masih perlu diperkuat agar kepercayaan publik terhadap program tetap tinggi. Terakhir, dimensi ketepatan menunjukkan bahwa kebijakan sudah sesuai dengan prioritas nasional dan

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 12 Okt 2025

Published : 23 Okt 2025

kebutuhan daerah, tetapi koordinasi antarinstansi dan keselarasan data masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, kebijakan ini dinilai telah berada di arah yang tepat dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran gizi dan partisipasi masyarakat, tetapi efektivitas dan pemerataannya perlu ditingkatkan agar penurunan stunting dapat berjalan lebih cepat, menyeluruh, dan berkelanjutan.

SARAN

Adapun saran yang disampaikan dalam penelitian ini, diantaranya :

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi lintas sektor melalui mekanisme koordinasi terpadu antara Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan instansi lain yang berperan dalam intervensi sensitif dan spesifik. Penguatan koordinasi ini harus diikuti dengan perencanaan terpadu dan pembagian tugas yang jelas agar program tidak berjalan sektoral.

Kedua, perlu adanya penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia, khususnya di wilayah pedesaan. Pemerintah daerah dapat menambah tenaga gizi dan kader kesehatan melalui pelatihan dan perekrutan lokal agar akses pelayanan gizi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program sanitasi dan penyediaan air bersih juga harus diprioritaskan, karena faktor lingkungan merupakan penyebab tidak langsung yang signifikan terhadap stunting.

Ketiga, pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi terpadu berbasis data real-time untuk memantau perkembangan status gizi anak di setiap desa. Data ini penting agar kebijakan dan intervensi dapat lebih tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Keempat, perlu diperkuat mekanisme respons publik dan partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat membuka kanal aduan dan forum dialog komunitas agar masyarakat

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

dapat berperan lebih aktif memberikan umpan balik. Selain itu, kegiatan penyuluhan harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat agar pesan gizi lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat.

Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menjadikan evaluasi kebijakan sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan administratif. Evaluasi periodik dengan pendekatan berbasis bukti akan membantu memastikan bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting tidak hanya berhasil menurunkan angka prevalensi, tetapi juga mampu membangun fondasi kesehatan masyarakat yang kuat dan berkelanjutan sebagai bagian dari visi pembangunan manusia Indonesia yang unggul.

REFERENSI

- Bappenas. (2022). *Laporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting nasional tahun 2022*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id>
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. (2023). *Profil kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2023*. Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Dwiyanto, A. (2020). Reformasi birokrasi dan evaluasi kebijakan publik di era otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Negara Indonesia*, 27(1), 12–29. <https://doi.org/10.21831/jani.v27i1.2020>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2021–2024*. Jakarta: Kemenko PMK.
- Marbun, R., & Nurlela, S. (2022). Evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting melalui pendekatan multi-sektor. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 12(2), 101–118. <https://doi.org/10.22304/jkpi.v12i2.2022>

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

-
- Nugroho, A., & Setiawan, B. (2022). Policy evaluation and stunting reduction programs in Indonesia: Collaborative governance perspective. *Journal of Public Policy Studies*, 8(2), 155–170. <https://doi.org/10.1080/jpps.2022.8.2>
- Purwanto, E. A., & Pratama, D. (2021). Collaborative governance in tackling stunting: Evidence from Indonesian districts. *Journal of Government and Civil Society*, 5(2), 145–161. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4552>
- Rahmawati, I., & Hidayat, R. (2020). Evaluasi program intervensi gizi dalam penurunan stunting di daerah tertinggal. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 34–48. <https://doi.org/10.19184/jikm.v15i1.2020>
- Rizki, F., & Lestari, P. (2023). Strengthening local government policy for stunting reduction through integrated nutrition interventions. *Public Administration and Policy Review*, 11(1), 72–89. <https://doi.org/10.23960/papr.v11i1.2023>
- Suhendra, D., & Fitriyah, A. (2021). Analysis of the effectiveness of government policy implementation on stunting prevention in Indonesia. *Journal of Policy and Management Review*, 6(3), 215–230. <https://doi.org/10.31104/jpmr.v6i3.2021>
- UNICEF Indonesia. (2021). *Situation analysis of children: Nutrition and stunting in Indonesia*. Jakarta: UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia>
- World Health Organization (WHO). (2023). *Global nutrition report 2023: Progress towards ending malnutrition*. Geneva: WHO Press. <https://www.who.int/publications>